

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau meliputi:

- a. Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Semau belum berhasil sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 kegagalan dalam aspek perencanaan yaitu waktu penyusunan RKAS dan RAB yang sering mengalami perubahan disusun oleh Tim BOS yaitu diawal tahun anggaran hingga akhir tahun anggaran, penggunaan skala prioritas kebutuhan sekolah, sasaran dana BOS dan publikasi kepada orangtua/wali murid.
  
- b. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Semau belum sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 yang meliputi penyaluran dana BOS tiap triwulan, pengambilan dana BOS oleh kepala sekolah dan bendahara, penggunaan dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah nonpersonalia, pembelanjaan dana BOS dilakukan oleh tim belanja barang/jasa, pembukuan dana BOS dilaksanakan oleh bendahara. Pembukuan dan bukti transaksi tersebut, akan dijadikan sebagai lampiran untuk melengkapi LPJ BOS.

- c. Pengawasan pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020. Pengawasan internal oleh Komite Sekolah mengenai ketepatan Pengelolaan Dana BOS dan RAB BOS. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan mengirimkan instrumen untuk diisi oleh warga sekolah. Evaluasi internal dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Evaluasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, terkait hasil LPJ BOS yang dikirimkan oleh sekolah.
- d. Pelaporan dana BOS pada SMP Negeri 2 Semau belum memenuhi kriteria yaitu sekolah mengalami kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahapan dan diserahkan kepada Tim BOS Kabupaten untuk diperiksa. Sedangkan dalam mempublikasikan ringkasan RKAS sekolah menjalankan secara transparan terkait dana BOS yang diterima dan pengeluaran per tahun anggaran di papan pengumuman. Selain itu juga menginformasikan penggunaan Dana BOS kepada wali murid dengan memberikan lembaran kertas saat diadakan rapat pleno.
- e. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Semau ialah a) Adanya perubahan RKAS, b) Adanya perubahan aturan juknis baru, c) keterlambatan penyaluran dana BOS dari pusat ke sekolah. Upaya penanganan yang dilakukan sekolah ialah a) Sekolah mengurangi belanja sekolah yang tidak terdaftar dalam

APBS, b) Tim BOS sekolah menempatkan kebutuhan yang paling utama untuk proses belajar mengajar dan gaji guru, c) Tim BOS sekolah membuat perencanaan anggaran perubahan yang kemudian dikonfirmasi dengan pemerintah pusat.

## **6.2 Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dan pembahasan, yaitu:

- a. Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan guru-guru melakukan rapat untuk mengatur pengelolaan dana BOS terkait perencanaan susunan RKAS dan RAB dengan baik untuk mengetahui permasalahan dan memberikan arahan yang lebih baik dalam pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOS sehingga berjalan dengan sesuai peraturan.
- b. Komite Sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi tidak hanya pada saat rapat pleno, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang di buat oleh pihak sekolah.
- c. Pemerintah meningkatkan jumlah alokasi dana BOS agar disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas sekolah. pemerintah dalam membuat kebijakan pembiayaan harus mengacu pada pemecahan masalah pendidikan dan harus melakukan pengawasan dari pusat sampai ke pihak sekolah dalam hal pengelolaan dana BOS BOS dapat berkualitas dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta.)
- Amiini, N.S (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arikunto Suharsimi. (2019). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Asnawi, A.P (2013). *Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan*). Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang
- Asmendri dan Firman. (2015). *Perencanaan Pendidikan*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Daryanto.(2013). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Indah Wahyuni. (2011). *Keefektifan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Daerah Miskin*: Jakarta.
- Ikhsan, Arfan. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Kusno, Masluyah Suib & Wahyudi (2016). “ *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang*”, <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 23 agustus 2022.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://bos.kemendikbud.go.id/media/share/upload/files/Juknis%20BOS%202115%20Final.pdf>. *Informasi Petunjuk Teknis BOS 2020*. Diakses pada 6 Juni 2022 pukul 17.20.
- Mulyono.2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Ngismatul Choiriyah, Manajemen Sumber Daya Anggaran Keuangan Pendidikan, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 8, Nomor 1, (Juni 2014)
- Novianty Romana (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPK Bukit Raya Serawai Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
- Nur Aiza. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sd Negeri 010 Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik*

65 Kabupaten Kuantan Singingi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

Suhayati, Anggadini Sri Dewi, 2009. *Akuntansi Keuangan*, Edisi Utama: Yogyakarta, Graha Ilmu

Siska Oriza (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 13 Sumani Kecamatan X Koto Singkarak*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakaerta: Rajawali Pess

Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin.(2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia